



Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura

Christina Irwati Tanan^{1*} | Maikel Walilo¹ | Minterlin Tresya Kenangalem¹

¹Universitas Ottow Geissler Papua
email correspondence: christinatanan06@gmail.com

Tanan, C. I., Walilo, M., Kenangalem, M., T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal*, 8(1), 15-22. Doi: <https://doi.org/10.22225/wedj.8.1.2025.15-22>

Abstract. *The Regional Government Information System functions as an information management tool for regional development, regional finance, and other local government affairs, which is interconnected and utilized by regional governments in the implementation of regional governance. However, issues are still frequently encountered in its use by local governments, making it necessary to take measures to address the problems related to SIPD implementation. This research also aims to identify the obstacles faced in implementing SIPD in Jayapura City and solutions to overcome these problems. The research was conducted at the Jayapura City BPKAD Office using data for 2021-2023. The data analysis used in this paper is qualitative descriptive data analysis. The research results show that the implementation of SIPD-RI in Jayapura City has shown a significant role in increasing the efficiency and effectiveness of regional financial management. Through process automation, SIPD-RI has succeeded in reducing the time required for financial management, increasing data accuracy, and strengthening transparency and accountability. Community involvement in monitoring financial reports has also increased, which supports better budget management. Suggestions to the Jayapura City Government include increasing the flexibility of the SIPD application, strengthening technological infrastructure, and improving coordination with the Ministry of Home Affairs' Data and Information Center (Pusdatin). Apart from that, it is important to provide regular training and assistance to Regional Apparatus Organizations (OPD) so that they can utilize SIPD optimally. With these steps, it is hoped that the implementation of SIPD-RI can provide maximum benefits for regional financial management and create a government that is more responsive to community needs.*

Keywords: *implementation; jayapura; regional finance; SIPD-RI*

Abstrak. Sistem Informasi Pemerintah Daerah berperan sebagai pengelolaan Informasi untuk pembangunan daerah, keuangan daerah, pemerintah daerah lainnya yang terhubung dan dimanfaatkan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan pemerintah daerah. Akan tetapi masih sering ditemukan kendala dalam penggunaannya di Pemerintah daerah, sehingga diperlukan upaya mengatasi masalah penggunaan SIPD. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD di Kota Jayapura dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian dilakukan di Kantor BPKAD Kota Jayapura dengan menggunakan data tahun 2021-2023. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD-RI di Kota Jayapura telah menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui otomatisasi proses, SIPD-RI berhasil mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan laporan keuangan juga meningkat, yang mendukung pengelolaan anggaran yang lebih baik. Saran kepada Pemerintah Kota Jayapura mencakup peningkatan fleksibilitas aplikasi SIPD, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan dan asistensi rutin kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mereka dapat memanfaatkan SIPD secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi SIPD-RI dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengelolaan keuangan daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keywords: Implementasi; Jayapura; keuangan daerah; SIPD-RI

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Dalam era digital saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan sistem informasi guna mengelola keuangan dengan lebih baik. Di Kota Jayapura, implementasi sistem informasi pada pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan kesalahan administrasi.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diharapkan mampu mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan aksesibilitas data, memudahkan proses analisis keuangan, dan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan. Namun, efektivitas sistem ini belum sepenuhnya diketahui, dan diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran SIPD dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. Sistem SIPD dianggap cukup mampu meningkatkan kedisiplinan para pengguna anggaran di lingkungan Pemkot Jayapura, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah di setiap OPD (Roberth Mboik, 2024). Untuk itu maka Sistem SIPD di Kota Jayapura perlu ditingkatkan sehingga benar-benar efektif. Sesuai SIPD dalam menunjang pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya dimana dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (<https://sipd.kemendagri.go.id/landing>, n.d.).

Peran SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah Jayapura beroperasi di bawah sistem desentralisasi, yang memungkinkan pengelolaan urusan administratif dan keuangan secara independen. Sistem pengelolaan keuangan di Jayapura, sebagai bagian dari kerangka yang lebih luas, dirancang untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Komponen utama sistem pengelolaan keuangan Jayapura mencakup. Penganggaran dan perencanaan, Manajemen pendapatan, Manajemen pengeluaran, Pelaporan keuangan. Penerapan SIPD di Jayapura bertujuan untuk menyempurnakan komponen-komponen tersebut dengan menyediakan platform digital untuk operasional yang lebih efisien dan transparan. Menurut Kementerian Dalam Negeri RI menjelaskan bahwa SIPD-RI berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara lebih efektif. Namun dalam penerapan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran yang terdapat terlaksana dengan prosedur yang ada SIPD-RI yang tersusun di setiap daerah/kota (<https://sipd.kemendagri.go.id/landing>, n.d.).

Pengelolaan keuangan di Kota Jayapura telah mengalami perubahan yang cukup besar sejak diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini dirancang untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Implementasi SIPD di Kota Jayapura telah membawa dampak positif, khususnya dalam mendorong kedisiplinan para pengguna anggaran, terutama dalam hal pengelolaan keuangan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Walaupun demikian, pelaksanaan SIPD di Kota Jayapura menghadapi sejumlah tantangan. Di tahap awal penerapan, kendala teknis serta proses penyesuaian terhadap sistem sempat menjadi hambatan dalam penginputan data. Kendati begitu, pemerintah daerah tetap menunjukkan komitmennya untuk terus memanfaatkan SIPD dan mengupayakan solusi atas berbagai kendala tersebut demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih optimal.

Seiring waktu, pemanfaatan SIPD di Kota Jayapura semakin membuktikan efektivitasnya. Sistem ini berperan tidak hanya dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran, tetapi juga dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan tepat. Penerapan ini selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel.

Keberhasilan penerapan SIPD di Kota Jayapura turut ditunjang oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pengguna sistem memiliki pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan SIPD, sehingga dapat memanfaatkan seluruh fitur dan fungsi yang tersedia secara optimal.

Secara umum, kemajuan dalam pengelolaan keuangan di Kota Jayapura melalui penerapan SIPD

mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi guna mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan, upaya yang terus dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIPD diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih efektif dan dapat dipercaya.

Namun penggunaan SIPD masih ditemukan masalah seperti faktor-faktor penghambat meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sepenuhnya mampu mengoperasikan SIPD, kurangnya fleksibilitas pada aplikasi SIPD, sering terjadinya gangguan server, jaringan yang masih tidak stabil, minimnya koordinasi antar OPD, ketiadaan SOP maupun standar sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta anggaran yang cenderung hanya difokuskan pada pengadaan sarana dan prasarana (Tumija & Erlambang, 2023).

Masalah SIPD di Kota Jayapura antarlain penggunaan aplikasi yang masih tergolong baru ini memerlukan berbagai penyesuaian, terutama dengan kendala jaringan yang kadang membutuhkan waktu lama untuk terhubung ke server di Jakarta. Selain itu, pihaknya juga masih memberikan pendampingan kepada OPD terkait dalam menggunakan aplikasi tersebut (Roberth Mboik, 2024).

Masalah SIPD di Kota Jayapura antarlain penggunaan aplikasi yang masih tergolong baru ini memerlukan berbagai penyesuaian, terutama dengan kendala jaringan yang kadang membutuhkan waktu lama untuk terhubung ke server di Jakarta. Selain itu, pihaknya juga masih memberikan pendampingan kepada OPD terkait dalam menggunakan aplikasi tersebut (Roberth Mboik, 2024).

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, seperti kurangnya pemahaman terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan serta keuangan daerah, masalah infrastruktur seperti jaringan atau server, keterbatasan dalam kesiapan standar satuan harga (SSH), dan ketiadaan SOP (Lumbantobing et al., 2022).

Tantangan Implementasi SIPD pemerintah daerah Jayapura merupakan sebuah langkah signifikan menuju modernisasi dan perbaikan praktik tata kelola. Meskipun data spesifik mengenai penggunaan SIPD di Jayapura terbatas, kerangka umum dan manfaat sistem ini kemungkinan besar dapat diterapkan di wilayah ini. Menurut (Wibowo et al., 2023) Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di Bapeda Kota Mataram berdasarkan Model TAM, telah berjalan dengan baik. Namun dari aspek persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) penggunaan SIPD masih belum sepenuhnya mampu meningkatkan kinerja secara optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (PP no 58 thn, 2005) dan Pemendagri Nomor 77 tahun 2020 (Permendagri, 2020) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. **Pengelolaan daerah erat kaitannya dengan** proses pengaturan dan penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup keseluruhan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007).

Pengelolaan Keuangan daerah erat kaitannya dengan APBD. Sehingga Manajemen Keuangan daerah berangkat dari pembahasan APBD. Pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berdampak merugikan masyarakat (Abdul Halim & Iqbal M, 2012). Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah perlu mengatur baik dari peraturan sampai kepada pelaksanaannya dapat berjalan baik. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat transparan, akuntabilitas, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu Akuntabilitas; value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas); kejujuran; transparansi dan penendalian (Abdul Halim & Iqbal M, 2012).

Salah satu sarana yang dirancang untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

SIPD berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan,

pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah (Rahman & Saputra, 2022). Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sudah menjalankan SPDI sesuai SOP dan memiliki sistem informasi cukup baik.(Edwin, 2022).

Untuk mengoptimalkan SIPD, diperlukan langkah-langkah yang lebih serius, seperti meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan intensif memperkuat infrastruktur teknologi, serta menyesuaikan prosedur operasional agar lebih fleksibel (Triwahyuni Fitri, 2024). SIPD dirancang untuk memaksimalkan data dapat memudahkan dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program sehingga dapat diakses secara terbuka oleh pemerintah daerah Kota Jayapura.

Penelitian oleh (Defanio Azriel Setiawan, 2024) menunjukkan implementasi SIPD berperan dalam mempermudah pengelolaan administrasi dan meningkatkan kualitas layanan internal pemerintahan. Bappeda Kota Jayapura terus berupaya untuk meningkatkan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel (ceposonline.com, 2024).

Penerapan Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di kantor BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara mempermudah pegawai dalam menyusun berbagai informasi, seperti data pembangunan daerah, keuangan daerah, serta urusan pemerintah lainnya (Permadi et al., 2023).

Koneksi internet yang lemah atau tidak stabil dapat mengganggu akses ke SIPD, mengakibatkan keterlambatan dalam pengimputan data, pengelolaan informasi, serta pelaporan keuangan (Sijabat et al., 2024).Demikian juga kendala yang dihadapi implementasi SIPD RI yang dihadapi Kabupaten Karanganyar masih terbatas pada tahap perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya fungsi aplikasi SIPD RI dalam tahap penatausahaan yang menghadapi kendala substansi maupun teknis (Arif & Firmansyah, 2024)

Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan SIPD penting dalam pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SIPD-RI di Kantor BPKAD Kota Jayapura serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam implementasinya serta memberikan masukan bagi Pemerintah terhadap penerapan SIPD-RI.

3. METODE

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis dilakukan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, dan peran SIPD dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kendala dan solusi penerapan SIPD di Kantor BPKAD Kota Jayapura.

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut: 1) wawancara yaitu teknik untuk memperoleh informasi tentang SIPD untuk melengkapi data implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. Wawancara kepada pegawai pada Kantor BPKAD yang menangani SIPD;2) Observasi yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data dengan melihat dan mencermati secara langsung implementasi SIPD dari tahun ke tahun yang diteliti;3) Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang merupakan data sekunder Implementasi SIPD BPKAD Kota Jayapura. Dan juga melalui penelitian terdahulu tentang implementasi SIPD.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD dalam Permendagri No.70 Tahun 2019(Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019) adalah pengelolaan Informasi Pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi yang diberikan dalam SIPD terkait informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil

pembangunan Daerah. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitorin, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Informasi Keuangan Daerah dikelola oleh BPKAD memuat: informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah, dan informasi Keuangan Daerah lainnya. Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah meliputi: penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, penyusunan rancangan APBD dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, meliputi: pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana; pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah; pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan; pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik meliputi: rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya. Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik, meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; dan penatausahaan. Dan Informasi Keuangan lainnya paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah.

Implementasi SIPD-RI Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura

Impelementasi SIPD-RI meliputi: Perencanaan Dan Penganggaran , Penatausahaan, Pelaporan. Perencanaan Dan Penganggaran menindaklanjuti PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Untuk itu Pemerintah Kota Jayapura sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah – Republik Indonesia (SIPD-RI) dalam proses Perencanaan dan Penganggaran. Tahapan Perencanaan dari pra-musrenbang hingga Penetapan RKPD dilakukan berbasis SIPD-RI. Tahapan Penganggaran dari Rancangan KUA-PPAS hingga Penetapan APBD Induk/Perubahan hingga penyerahan DPA/DPPA juga berbasis SIPD-RI.

Penatausahaan Pemerintah Kota Jayapura juga telah menerapkan Sistematisasi Penatausahaan Keuangan Daerah berbasis SIPD-RI. Mekanisme Penatausahaan telah di atur berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanisme penatausahaan keuangan daerah meliputi beberapa hal, di antaranya: Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Penerimaan, penyimpanan, penyetoran, dan pembayaran, Pertanggungjawaban. Penatausahaan keuangan daerah berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun. Mekanisme ini dilakukan berbasis SIPD-RI dan dikontrol secara langsung oleh Operator Teknis SIPD-RI di BPKAD Kota Jayapura. Pelaporan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dapat dilakukan melalui aplikasi SIPD Aklap dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP). Pemerintah Kota Jayapura baru akan menggunakan SIPD-RI dalam Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2024.

Peran SIPD RI Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa fungsi, diantaranya: menyediakan referensi nasional, seperti program kegiatan, sub-kegiatan, sumber dana, akun neraca, anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA); memudahkan proses perencanaan dan keuangan daerah secara elektronik; memudahkan evaluasi perencanaan keuangan, kinerja, dan produk hukum secara elektronik; membantu

pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi regulasi pengelolaan keuangan daerah; membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan memungkinkan kemendagri dan pemerintah provinsi untuk memantau keuangan daerah secara berjenjang dan real-time.

Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Kota Jayapura dalam hal ini BPKAD Kota Jayapura dalam Pengelolaan Keuangan daerah. Meliputi Mendisiplinkan dalam pelaksanaan anggaran, seperti didalam penatausahaan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dapat berperan dalam peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dimana anggaran yang digunakan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan demikian pengelolaan keuangan daerah lebih dapat menguatkan akuntabilitasnya; Memudahkan dalam hal Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Pemerintah Pusat secara real-time dimana sistem ini tersentralisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga mengatasi penyimpangan anggaran dan sesuai anggaran yang direncanakan; Dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih efektif dan efisien. Peran SIPD di BPKAD Kota Jayapura dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Peran SIPD Di BPKAD Kota Jayapura

No	Peran SIPD	Dampak SIPD
1.	Mendisiplinkan Pengguna anggaran	Kepatuhan OPD meningkat dalam Penatausahaan Keuangan dan mempercepat didalam proses asministrasi
2.	Peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan	Berkurangnya kekuatan penyalahgunaan anggaran dan kepercayaan publik meningkat
3.	Monitoring dan evaluasi anggaran lebih mudah dilakukan	Evaluasi secara real-time oleh pusat lebih cepat dilakukan demikian juga identifikasi masalah dalam anggaran
4.	Dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data perencanaan yang akurat, terarah dan efektif
5.	Adanya sentralisasi dengan kemendagri	Laporan keuangan daerah dengan kebijakan nasional lebih selaras
6.	Efisiensi kerja meningkat melalui sistem digitalisasi	Beban kerja manual berkurang dan proses pelaporan dan pencatatan lebih cepat
7.	Sebagai alat bantu didalam pengambilan keputusan	Dapat menyediakan data real-time dan terintegrasi yang menjadi dasar kebijakan fiskal daerah

Sumber: BPKAD Kota Jayapura, 2025

Kendala yang Dihadapi Dalam Implementasi SIPD-RI Di Kota Jayapura

Kendala yang dapat menghambat efektivitas SIPD, di antaranya: Aplikasi SIPD kurang fleksibel; Server yang down; Jaringan kurang stabil; dan Respon Pemerintah Pusat (Pusdatin KEMENDAGRI) yang kurang optimal dalam mengatasi trouble/error sistem pada Aplikasi SIPD-RI.

Solusi untuk mengoptimalkan Implementasi SIPD-RI dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Jayapura, antara lain :Melakukan Koordinasi dan Konsultasi secara langsung di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KEMENDAGRI; Meningkatkan Kualitas Jaringan Internet; Melakukan Asistensi secara rutin kepada OPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Kendala dan solusi Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel.2.

Tabel 2. Kendala dan Solusi Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Jayapura

No.	Kendala	Solusi
1.	Jaringan internet kurang stabil	Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan internet yang stabil secara menyeluruh.
2.	SDM belum sepenuhnya mahir atau terbiasa dalam penggunaan Aplikasi SIPD	Melakukan asistensi secara rutin kepada OPD/Unit Kerja kepada OPD atau unit kerja di pemma Kota Jayapura.
3.	Aplikasi SIPD Kurang Flexibel, terkait gangguan teknis saat input data atau akses sistem SIPD	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusdatin KEMENDAGRI terkait masalah teknis untuk mengatasi trouble/error sistem Aplikasi SIPD
4.	Belum optimalnya pemanfaatan fitur pelaporan dalam SIPD	Perlu sosialisasi manfaat lengkap SIPD dan bimbingan teknis secara keseluruhan fitur-fitur dalam SIPD
5.	Beban kerja double saat sistem manual dan SIPD dilakukan bersama-sama	Penetapan timeline penghentian sistem manual agar fokus pada sistem SIPD

Sumber: BPKAD Kota Jayapura, 2025

5. KESIMPULAN

Implementasi SIPD-RI dalam pengelolaan daerah di Kota Jayapura meliputi: perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan. Peran SIPD-RI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan daerah dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kendala yang dihadapi dalam implementasi-RI di kota Jayapura terkait dengan aplikasi kurang fleksibel, server sering down, masalah jaringan yang tidak stabil, bila ada masalah pada sistem SIPD-RI respon pusat kurang cepat ditangani.

Untuk mengatasi kendala penggunaan Aplikasi SIPD-RI maka Pemerintah kota Jayapura melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat dalam hal ini adalah Pusdati Kemendagri. Penelitian ini membahas SIPD hanya di BPKAD Kota Jayapura dan fokus pada lingkup pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan penelitian selanjutnya adalah pembahasan SIPD lebih luas di Kota Jayapura dan juga membahas SIPD tidak hanya terbatas pada informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim;Iqbal M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (ketiga). UPP STIM YKPN.
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- ceposonline.com. (2024, August 1). SIPD Kota Jayapura Sudah Terintegrasi Dengan Kemenkeu. *Cenderawasih Pos*. https://cenderawasihpos.jawapos.com/metropolis/01/08/2024/sipd-kota-jayapura-sudah-terintegrasi-dengan-kemenkeu/?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
- Defanio Azriel Setiawan, R. A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Memfasilitasi Kerumahtanggaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 4(1), 433–440. <https://doi.org/10.37504/map.v6i4.585>
- Edwin, K. M. (2022). Analisis sistem informasi pembuatan objek pajak baru pada badan pendapatan daerah kota semarang. *Unisula Repository*. https://repository.unissula.ac.id/30664/1/Akuntansi%28D3%29_49402000023_fullpdf.pdf
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Ketiga). Salemba Empat.
- <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>. (n.d.). *SIPD Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI*. <https://Sipd.Kemendagri.Go.Id/Landing>. <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>
- Lumbantobing, S. L., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. *Perspektif*, 11(4), 1546–1558. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7227>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Permendagri Republik Nomor 70.
- Permadi, R., Yusuf, M., & Sari, D. W. (2023). Implementasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Bpbd Muratara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(1), 09–20. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i1.83>
- Permendagri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Permendagri No 77 Tahun 2020.
- PP no 58 thn, 2008. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 105.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Roberth Mboik. (2024). Penggunaan SIPD Mendisiplinkan Pengguna Anggaran. *Ceposonline.Com*. <https://www.ceposonline.com/kota-jayapura/1994373730/penggunaan-sipd-mendisiplinkan-pengguna-anggaran>

- Sijabat, J., Judika, M., Siringoringo, B., Findy, G., & Simanjuntak, R. (2024). Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 1169–1183.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Triwahyuni Fitri, F. Y. (2024). Analisis Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Untuk Penatausahaan Keuangan Di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertahanan Kabupaten Kotawaringin timur. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132–137. <https://nusantarahasanajournal>
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). Systems To The Administration Process Of Regional. *Jurnal Tata Sejuta STLA MATARAM*, 9(2).